

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Anwar. 2008. *Bunghatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Multi Press Indo.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Zainudin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arsyad, Lincolin. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Asy'ari, Sapari Imam. 2004. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2017.
- Badan Pusat Statistik. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 36
- Fatah, N. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Komite Sekolah*.
- Fitriyani, Yuli et al. 2019. "Menggerakkan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa." (May).
- HB, Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Ihsan, Ahmad Nur. 2016. "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep". Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Kamaroesid, Herry. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana media.
- Kasianto, M.J. 1994. *Masalah Dan Strategi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemeritahan Desa*. Jakarta, Erlangga.
- Setiadi, Wicipto dkk. 2010. *Pedoman pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsesi Rancangan Peraturan perundang-undangan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- Subeki, R. (2015). *Mohammad, Jauhar. Pengantar Manajemen. Cet. II*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Alfabeta: Bandung.
- Susanti, Dyah Ochthorina dan Efendi, A'an. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Michael P, dan Stephen. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid 1*. Jalarta: Erlangga.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Hendro. 2014. "Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Menuju Koperasi Berbasis It Hendro Wibowo, pp. 17–30
- Widyaastuti, Yuli. 2017. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kejahteraan masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Tengah Perspektif Ekonomi Islam" *Skripsi* .

Jurnal

- Amri, Khairul. 2015. Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3, Juli 2015: 295-299*.
- Dewi, Amalia Sri Kusuma. 2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014*
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Volume V No. 1 Februari (2014)* .
- Filya, Afifa Rachmanda. "Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)". *Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Vol. 5, No.1.2018*.
- Gunanto, Edy Yusuf Agung., Dkk. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Vol 13 No 1 (2016)*
- Kimbal, Alfon. Trivena Y.P. Karinda, Welly Waworundeng. 2020. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Jurnal Politico. Vol 9 No 3*.

Sugiarto, Eddy. 2007. Teori Kesejahteraan Sosial dan Pengukurannya. *Jurnal Eksekutif*, Vol. 4, No. 2.

Wahed, M., Asmara, K., & Wijaya, R. S. (2020). Pengembangan Ekonomi Desa Dengan Instrumen Badan Usaha Milik Desa (BUMDESa). *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 58-70.

Wawancara

Burhan, Masyarakat Desa Ngawi , wawancara, 13 November 2021.

Eko budi S, Kepala Desa Ngawi , wawancara, 12 November 2021

Eni, pengurus BUMDes Ngawi, wawancara, 11 November 2021.

Giarti Ningsih, Ka.Unit Simpan Pinjam BUMDes Ngawi, wawancara, 12 November 2021.

Hasnah, Karyawan BUMDes Ngawi, wawancara, 10 November 2021.

Jumanto. Ketua Bumdes desa Ngawi, *Wawancara*, 27 Agustus 2021.

Juwairiyah, Masyarakat Desa Ngawi , wawancara, 14 November 2021

Karman, Masyarakat Desa Ngawi , wawancara, 15 November 2021.

Marni, Masyarakat Desa Ngawi , wawancara, 14 November 2021

Mustika, Kadus 04 Desa Ngawi , wawancara, 11 November 2021.

Raudoh, Masyarakat Desa Ngawi , wawancara, 15 November 2021.

Rohim, Masyarakat Desa Ngawi , wawancara, 15 November 2021.

Seniwati, Masyarakat Desa Ngawi , wawancara, 15 November 2021.

Suryo, Masyarakat Desa Ngawi , wawancara, 14 November 2021

Yogis pratama, Sekretaris BUMDes Ngawi, wawancara, 11 November 2021.

Zainiri, Masyarakat Desa Ngawi , wawancara, 13 November 2021.

Internet

Desapedia.id “inilah faktor pendukung dan menghambat berkembangnya BUMDes” diakses pada 21 Oktober 2021 pukul 13:40 WIB.

Grata.com. “BUMDes lebih berkembang dengan ekonomi solidaritas” .diakses pada 18 Oktober 2021 pukul 14:35 WIB.

<https://bpsdmd.jatengprov.go.id/eproper/inovasi.php?id=223>

<https://infobumdes.id/jenis-usaha-bumdes/>

M.Republika.co.id. “sistem ekonomi islam dalam penguatan Badan Usaha Milik desa” di akses pada 21 Oktober 2021 pukul 17:05 WIB.

Setiawan, Parta. 2019. *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*, 11 September 2019, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 19.00 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah 72/2005 (Pasal78–81) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2010(Pasal. 5 ayat (1 dan 2), pasal 6 dan 7, pasal 9 – 11, pasal 21 dan 23

Ps. 21 PMDG 39/2010

Ps. 22 PMDG 39/2010

Ps. 23 PMDG 39/2010

Ps. 9-10 PMDG 39/2010

Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.